

Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Waropen)

Edwin Umbora, Syaikhul Falah, Bill J.C Pangayow

edumbora27@gmail.com sehufallah@gmail.com billpangayow@gmail.com

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Asset Management on Fixed Assets Optimization of Local Governments. This research was conducted at the Regional Government of Waropen District. Asset management variables consist of Inventory, Identification, Legal Audit and Asset Assessment. Thirty six (36) employees who have knowledge of asset utilization and regional goods management staff were involved as respondents on this survey. The analytical tool in this study uses SPSS. This type of research is focusing on verification of the effect of independent variables on the dependents, and this research uses Multiple Regression Analysis, so that the result is expected to meet the Classical Assumption Test. The results of this study indicate simultaneously that inventory, identification, legal audit and scoring system of the variables influence the optimization of Fixed Asset Utilization, with a significance value of 0,000. However, partially, inventory and identification have no effect with a greater significance value p value. Meanwhile, the Legal Audit and Assessment affect the Optimization of Fixed Asset Utilization moderately.

Keywords: *Inventory, Identification, Legal Audit, Assessment and Optimization of Asset Utilization*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manajemen Aset merupakan salah satu topik yang menarik dibicarakan khususnya di Indonesia. Setiap organisasi swasta maupun organisasi pemerintah tentunya memiliki aset, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Setiap aset yang dimiliki harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi sektor swasta maupun publik. Peran penting manajemen aset, baik di sektor swasta maupun publik, semakin diakui dan tidak kalah dengan peran manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia.

Pentingnya pengelolaan aset terutama tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan keberadaan manusia. Salah satu bentuk pengelolaan aset adalah konsep *real property*, yaitu suatu hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan berikut bangunan (permanen) yang didirikan di atasnya atau tanpa bangunan. Pengertian penguasaan di atas perlu dibedakan antara penguasaannya secara fisik atas tanah dan/atau bangunan yang disebut *real estate*. Sedangkan *real property* merupakan kepemilikan sebagai konsep hukum (penguasaan secara yuridis) yang dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah (Siregar, 2004)

Pengelolaan (*manajemen*) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu: inventarisasi, identifikasi, legal audit, dan penilaian yang dilaksanakan dengan baik dan akurat. Sekarang ini, Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004).

Penelitian mengenai Manajemen Aset di Kabupaten Waropen belum pernah dilakukan namun beberapa penelitian mengenai manajemen aset telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Pakiding (2006) dalam penelitiannya tentang " Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan), Studi Kasus di Kabupaten Bantul. Variabel yang digunakan Inventarisasi, identifikasi, legal audit dan penilaian. Sampel sebanyak 40 orang dengan metode purposive sampling. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas diukur dengan menggunakan statistik deskriptif, korelasi spearman rank dan diestimasi dengan regresi multinomial logistik. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa manajemen aset dalam optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) dipengaruhi secara signifikan oleh inventarisasi dan penilaian aset. Variabel bebas lainnya identifikasi dan legal audit menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh.

Chair (2001) mengadakan suatu studi kasus di pemerintah daerah DKI Jakarta tentang peranan manajemen dalam upaya meningkatkan kegunaan aset tanah dan bangunan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan keprogresifan status manajemen aset daerah. Metode yang digunakan adalah *cluster analysis* dan hasil yang diperoleh adalah adanya tingkat aktifitas yang tinggi terhadap pelaksanaan dan pengawasan manajemen aset tanah dan bangunan serta adanya perbedaan kinerja manajemen aset kelurahan yang terbentuk berdasarkan luas tanah dan bangunan yang dimiliki.

Bertovic, *et al.* (2002) menjelaskan bagaimana teknik mengimplementasikan manajemen aset secara bertahap (studi kasus pemerintah lokal di Negara Kroasia) beserta beberapa permasalahan yang mesti diwaspadai selama pelaksanaan dan solusi praktisnya. Di negara New Zealand (2001) pengelolaan aset tetap dikelola oleh suatu departemen tersendiri (*the treasury*) dan telah menetapkan garis-garis besar strategi serta mengeluarkan pedoman dan prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan akuisisi dan manajemen aset tetap. Sementara itu, Bohn (2002) mengadakan penelitian tentang pilihan berbagai alternative manajemen terhadap hutang dan aset pemerintah dalam suatu neraca keuangan yang meliputi kekayaan (*treasury*) *The Federal Reserve*, serta jaminan sosial. Penelitian ini mengkaji berapa jumlah dana yang harus diinvestasikan oleh pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saham pendapatan tetap yang memenuhi kualitas tertinggi (*high-quality fixed-income securities*) merupakan patokan (*benchmark*) terbaik dan jaminan sosial yang paling diminati oleh manajer aset pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Bloomquist dan Oldach (2005) menjelaskan bahwa optimalisasi aset perusahaan memerlukan pendekatan perbaikan yang "cerdas" dengan memadukan teknologi secara strategis, metodologi yang handal, proses pemeliharaan yang terbaik dan perubahan budaya dalam sebuah program yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wardhana (2005) meneliti mengenai bagaimana mengelola aset Kota Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai keberadaan potensi kota sebagai aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, permasalahan yang dihadapi berikut upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya restrukturisasi organisasi dalam pengelolaan aset melalui pembentukan Badan Pengelola dan Dewan Supervisi Aset Kota, sehingga dari sisi anggaran biaya pengelolaan aset dapat ditekan secara signifikan dan kinerja organisasi dalam pengelolaan aset akan dapat diukur.

Penelitian yang dilakukan oleh Aronggear (2015) menemukan bukti empiris bahwa manajemen aset dipengaruhi oleh inventarisasi, legal audit, dan pembukuan. Sedangkan Widayanti (2010), menambahkan variabel identifikasi serta penilaian dalam risetnya. Penelitian ini merupakan replikasi murni dari penelitian Widayanti (2010). Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah pada lokasi penelitian yang mana mengambil lokasi Penelitian di Kabupaten Waropen.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintah Kabupaten Waropen?
2. Apakah terdapat pengaruh identifikasi terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintah Kabupaten Waropen?
3. Apakah terdapat pengaruh legal audit terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintah Kabupaten Waropen?
4. Apakah terdapat pengaruh penilaian terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) di Pemerintah Kabupaten Waropen?

KAJIAN PUSTAKA

Good Governance Theory

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemimpinan) sedangkan istilah yang lebih *good corporate governance* populer disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Sedangkan menurut Syakhroza (2013) menjelaskan arti *good governance* sebagai tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi atau mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen Aset

Sejak reformasi keuangan negara bergulir, yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang (UU) nomor 17 (2003) tentang Keuangan Negara, pemerintah Republik Indonesia telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern (*sound and modern*). Lingkup perubahan yang terjadi sangat mendasar dan bersifat menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset negara. *International best practices* memperlihatkan peran strategis pengelolaan aset negara sebagai salah satu indikator penting pengelolaan anggaran negara dan upaya perwujudan akuntabilitas tata kelola suatu keuangan negara.

Manajemen aset memiliki beberapa aktivitas utama, yaitu analisis kebutuhan, penilaian ekonomis, perencanaan, penentuan harga, pengadaan dan penghapusan, pencatatan, penilaian, dan pelaporan. Manajemen aset ini berkembang cukup pesat dimulai dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif dan strategis. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen aset mencakup proses mulai dari proses perencanaan (*planning*) sampai dengan penghapusan (*disposal*) dan perlu adanya pengawasan terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi.

Prinsip Manajemen Aset

Real estate sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca keuangan daerah aset dapat menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan. Namun masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan aset secara cermat. Beberapa model manajemen aset yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah (Bertovic *et al.* 2002).

1. Mengembangkan sistem *data base* yang baik

2. Memahami isu-isu transisi;
3. Pengklasifikasian terhadap properti;
4. Adanya penilaian real estate dan penilaian bisnis;
5. Membuat aturan untuk properti yang menghasilkan pendapatan;
6. Analisis finansial secara intensif terhadap proyek, properti dan portofolio;
7. Adanya deregulasi bisnis persewaan;
8. Sistem pelaporan properti;
9. Konsolidasi manajemen; dan
10. Perencanaan strategis.

Inventarisasi Aset

Menurut Siregar (2004) tahapan manajemen aset daerah sebagai berikut : Inventarisasi aset, yang terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dapat dibagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan atau pelaksanaan pencatatan, dan kegiatan atau pelaksanaan pelaporan. Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku-buku dan kartu-kartu sebagai berikut.:

1. Buku Induk Inventarisasi (BII).
2. Buku Inventarisasi (BI).
3. Kartu Inventarisasi Barang (KIB).
4. Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR).

Dalam pelaksanaannya pelaporan dipergunakan daftar-daftar yaitu :

1. Daftar rekapitulasi (jumlah barang hasil sensus, daftar mutasi barang).
2. Daftar mutasi barang. Buku induk inventarisasi adalah merupakan gabungan/kompilasi dari buku inventarisasi.

Legal Audit

Siregar (2004) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

Berdasarkan Perppmendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, Legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administratif dapat dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surat perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya.

Identifikasi

Identifikasi adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk mengelompokkan dan mendefinisikan aset-aset daerah secara baik serta memberikan kode sehingga dapat diketahui secara pasti fungsi dan kegunaan serta lokasi dan bidang barang dari aset tersebut.

Penilaian Aset

Penilaian adalah satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; penilaian barang milik daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar.

Optimalisasi Aset

Aliasuddin (2002), menyatakan bahwa optimalitas adalah salah satu usaha yang ingin dicapai oleh setiap unit bisnis. Ada dua segi optimalitas yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pengeluaran. Produksi maksimum tidak menjamin keuntungan maksimum. Untuk itu, produksi optimal lebih baik daripada produksi maksimal karena produksi optimal menjamin keuntungan maksimal.

Boediono (1999) menyatakan bahwa hasil akhir dari model matematika berkaitan erat dengan beberapa variabel, kendala, dan fungsi tujuan, solusi dari model yang kemudian akan menghasilkan sebuah nilai dari beberapa variabel keputusan yang optimum (maksimasi dan minimasi) menunjukkan nilai fungsi tujuan yang memuaskan seluruh kendala. Solusi tersebut sering diistilahkan dengan solusi kelayakan optimum (*optimum feasible solution*); lebih lanjut dijelaskan bahwa *feasible solution* adalah suatu yang memenuhi seluruh kendala (*constraints*) yang ada dalam persoalan tersebut, istilah optimum solution adalah *feasible solution* yang memberikan nilai “terbaik” bagi fungsi tujuan. Terbaik diartikan sebagai nilai terbesar apabila tujuannya maksimisasi, dan diartikan sebagai nilai terkecil apabila fungsi tujuannya minimasi. Maksimalisasi adalah usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan total penerimaan atau total keuntungan pada kendala sumber daya yang terbatas Husaini dalam Jusmin (2013). Jadi maksimalisasi aset adalah usaha organisasi untuk meningkatkan daya saing untuk meningkatkan nilai, untuk pencapaian tersebut dibutuhkan penerapan manajemen aset secara konsisten.

Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pada Kabupaten Waropen

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Agar buku inventarisasi dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus lebih tertib, teratur, dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat. Semakin besar peningkatan inventarisasi aset daerah maka akan menyebabkan peningkatan pada optimalisasi aset tetap daerah. (Widayanti, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Antoh (2012) terkait pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Paniai. Variabel-variabel yang digunakan adalah inventarisasi, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel inventarisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan). Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan di atas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1 :Inventarisasi Aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Waropen

Pengaruh Legal Audit Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pada Kabupaten Waropen

Selain proses inventarisasi, maka hal penting selanjutnya dalam optimalisasi aset yang perlu dilakukan adalah legal audit. Berdasarkan Perpmendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, Legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2013), tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalitas aset rumah sakit jiwa Daerah Provinsi Sumatra Utara. Variabel-variabel yang digunakan adalah inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa legal audit aset terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalitas aset. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan di atas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2 : Legal Audit berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Waropen.

Pengaruh Identifikasi Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pada Kabupaten Waropen

Proses identifikasi terhadap inventaris tetap juga sangat diperlukan. Identifikasi adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk mengelompokkan dan mendefinisikan aset-aset daerah secara baik serta memberikan kode sehingga dapat diketahui secara pasti fungsi dan kegunaan serta lokasi dan bidang barang dari aset tersebut. Hal ini berkaitan dengan proses pengurusan dan penertiban pencatatan barang yang digunakan dalam proses pemakaiannya, maka Kepala Daerah menunjuk/menetapkan kembali pengurus barang pada masing-masing unit. Dengan mengingat prinsip organisasi dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah, maka fungsi atau wewenang pengurusan tersebut dilimpahkan kepada aparat pembantunya tanpa mengurangi tanggung jawab Kepala Daerah. Dengan demikian mekanisme pengelolaan barang daerah yaitu adanya fungsi otorisator (Kepala Daerah), ordonatur (Unit Kerja yang berwenang/ dilimpahi tugas) dan Bendaharawan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

H3 : Identifikasi berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Waropen.

Pengaruh Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pada Kabupaten Waropen

Penilaian aset merupakan suatu proses indikasi, melalui suatu pengetahuan atau metode tertentu terhadap suatu objek untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Penilaian aset perlu dibedakan dengan penilaian pada umumnya. Penilaian aset dilakukan khusus atas suatu aset (harta/benda) dari suatu entitas kepemilikan. Penilaian aset (*appraisal/valuation*) harus dipahami sebagai suatu proses ilmiah yang dilakukan seorang penilai untuk mendapatkan estimasi nilai suatu aset tertentu. Mengingat konsep aset yang dinilai adalah dalam konsep hukum yang mempunyai nilai ekonomis, maka indikasi nilai yang dihasilkan dari suatu penilaian dituangkan dalam satuan moneter. Penilaian merupakan ilmu praktis yang bersifat multi disiplin, karenanya kaitan dan dukungan ilmu pengetahuan lainnya sangat penting untuk dipahami oleh para penilai.

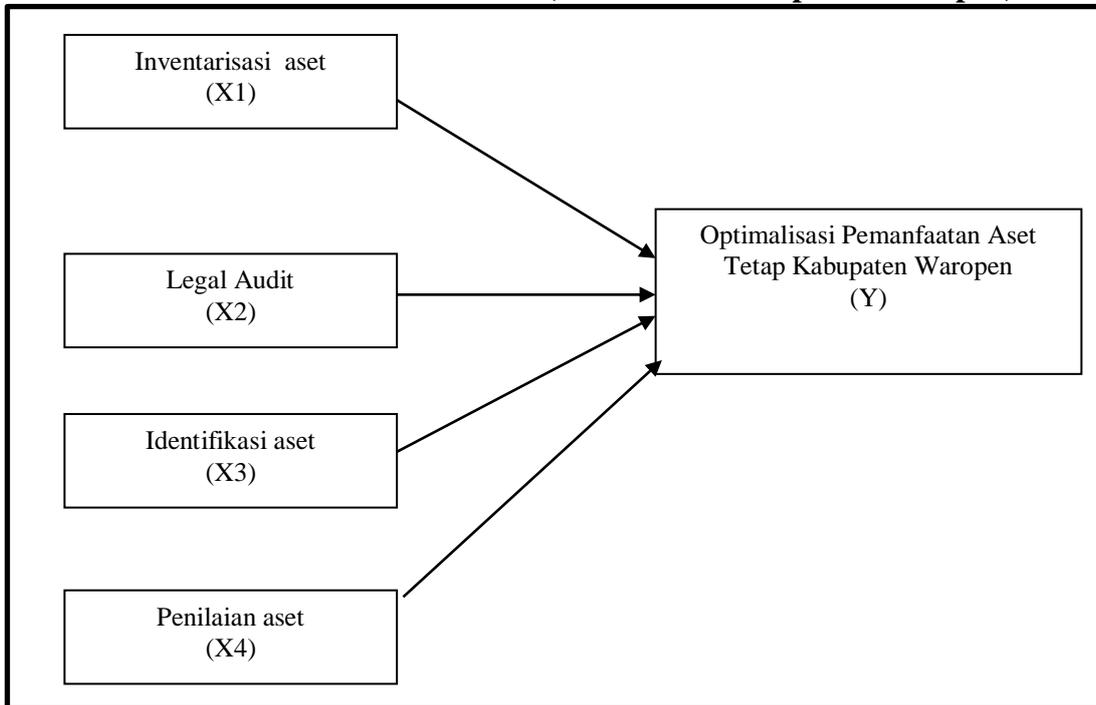
Penelitian yang dilakukan oleh Widayanti (2010), tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap Pemerintah Kabupaten (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). Variabel-variabel yang digunakan adalah inventarisasi aset, identifikasi dan legal audit, serta penilaian aset. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian aset terbukti berpengaruh terhadap optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten Sragen. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan di atas dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

H4 : Penilaian Aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Waropen.

Model Penelitian

Penelitian ini akan menguji variabel inventarisasi, legal audit, identifikasi dan penilaian aset, terhadap optimalisasi aset tetap di Kabupaten Waropen.

Gambar 1
Model Penelitian
Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada
Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Waropen)



Sumber : Peneliti, 2018

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden. Adapun Lokasi penelitian ini bertempat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Waropen.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono dalam Aronggear (2015). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada OPD di Pemerintah Kabupaten Waropen.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan serta yang mengerti dan mampu memberikan gambaran sesuai dengan tujuan penelitian (Jusmin, 2013). Adapun kriteria-kriteria yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Barang milik daerah selanjutnya disebut sebagai kuasa pengguna barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang.
2. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan mengeluarkan dan menatausahakan BMD
3. Pengurus Barang pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan BMD pada Pengguna barang.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Inventarisasi Aset (X1), Legal Audit (X2), Identifikasi (X3) dan Penilaian Aset (X4), Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Optimalisasi Aset (Y).

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Inventarisasi

Inventarisasi aset (X1) adalah proses kerja yang terkait dengan cara pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/ administrasi baik fisik maupun legal. Misalnya dalam pendataan mengenai bentuk, luas, volume/jumlah, jenis, alamat dari suatu aset dalam hal ini aset tetap tanah dan bangunan. Kuesioner yang digunakan dengan mengacu pada kuesioner Jusmin (2013), variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

Legal Audit

Legal audit aset (X2) adalah proses kerja yang terkait dengan cara pengaturan yang jelas mengenai status penguasaan aset tanah berupa sertifikat, penggunaan dan pengalihan aset. Dimana legal audit lebih terkait dengan tindakan hukum. Kuesioner yang digunakan dengan mengacu pada kuesioner Jusmin (2013), variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

Identifikasi

Identifikasi adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk mengelompokkan dan mendefinisikan aset-aset daerah secara baik serta memberikan kode sehingga dapat diketahui secara pasti fungsi dan kegunaan serta lokasi dan bidang barang dari aset tersebut. Variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

Penilaian

Penilaian aset (X4) adalah suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. Yang biasanya dilakukan oleh konsultan penilaian independen (sertifikasi) dengan mencantumkan nilai aset dalam rupiah. Hasil penilaian dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan aset tersebut. Kuesioner yang digunakan dengan mengacu pada kuesioner Jusmin (2013), variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

Optimalisasi Aset

Optimalisasi Aset (Y) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Kuesioner yang digunakan dengan mengacu pada kuesioner Aronggear (2015).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada pegawai yang bekerja pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Waropen. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui pembagian kuesioner di lapangan atau tempat penelitian dan wawancara secara langsung dengan responden. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang secara tidak langsung diperoleh melalui media perantara (Diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifatnya saling melengkapi.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (*Field research*), yaitu data yang di kumpul melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (score) serta wawancara langsung kepada para pegawai. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang digunakan pada penelitian Jusmin (2013). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara membagikannya kepada pegawai yang bekerja serta sesuai dengan kriteria pada seluruh satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Waropen.

Uji Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 16.0. Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan individual antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sehingga persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon,$$

Keterangan:

- Y = optimalisasi aset tetap
- X1 = inventarisasi aset;
- X2 = legal audit aset;
- X3 = Identifikasi;
- X4 = penilaian Aset;
- ε = kesalahan acak (random error)
- β_0 = konstanta;
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

Uji Kualitas Instrumen

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*Reliability*) dan tingkat keabsahan (*Validity*) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Danang, 2011). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui grafik *histogram* dan normal *probability plot*. Untuk grafik histogram, jika data rill membentuk garis kurva cenderung tidak simetri terhadap mean (U) maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal, begitupun sebaliknya. Sementara untuk cara normal probability plot, dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal daripada grafik histogram karena cara ini membandingkan data rill dengan data distribusi normal (Danang, 2011).

Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari minimal dua variabel bebas, dimana akan diukur tingkat asosiasi (keeratn) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dalam menentukan terjadinya multikolinieritas dapat digunakan cara sebagai berikut.

- a. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0.6.
- b. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a).
- c. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Dapat disimpulkan bahwa, jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Nilai Tolerance (a) dapat dihitung dengan persamaan ($a = 1/VIF$), sementara nilai *Variance Inflation Factor* dapat dihitung dengan persamaan ($VIF = 1/a$). Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a hitung $< a$ dan VIF hitung $< VIF$ (Danang, 2011).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Dan yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Dan yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas. Dengan uji Glejser, heteroskedastisitas terjadi jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari besar 0,05 sementara homoskedastisitas terjadi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R^2) yang merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (Ghozali, 2016).

Uji Parsial (Uji t)

1) Hipotesis

- a. H_0 = Inventarisasi aset, legal audit, Identifikasi dan penilaian aset, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset di Kabupaten Waropen.
- b. H_a = Inventarisasi aset, legal audit, Identifikasi dan penilaian aset, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset di Kabupaten Waropen.

2) Kriteria Pengujian yaitu Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak dan Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan sudah fix atau tidak. Dengan menggunakan uji F , yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat α 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5 % maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

1. Hipotesis

- a. H_0 = Inventarisasi aset, legal audit, Identifikasi dan penilaian aset, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset di Kabupaten Waropen.

- b. H_a = Inventarisasi aset, legal audit, Identifikasi dan penilaian aset, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset di Kabupaten Waropen.
2. Kriteria Pengujian yaitu Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak dan Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Waropen dengan responden pegawai yang memiliki pengetahuan terkait manajemen aset dan staf pengelola barang pada masing-masing OPD tersebut. Penyebaran kuesioner dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2018 hingga 7 Juni 2018. Dari 135 kuisisioner yang telah disebar, ada 97 kuisisioner yang tidak dikembalikan, sehingga kuisisioner yang dapat diolah yaitu sebanyak 36 kuisisioner.

Tabel 1. Nama Instansi yang Mengembalikan Kuesioner

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Responden	Prosentase (%)
1	Badan Pembangunan Perencanaan Daerah	3	0,08
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	2	0,05
3	BPKAD	1	0,02
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3	0,08
5	Dinas Kesehatan	3	0,08
6	Dinas Pariwisata	3	0,08
7	Dinas Pekerjaan Umum	1	0,02
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	0,08
9	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	2	0,05
10	Dinas Perikanan	2	0,05
11	Dinas Perindakop UKM dan Transportasi	1	0,02
12	Dinas Sosial	4	0,01
13	Inspektorat	2	0,05
14	Penanggulangan Bencana Daerah	3	0,08
15	Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	1	0,02
16	Satuan Polisi Pamong Praja	1	0,02
17	Sekretariat Daerah	1	0,02
Jumlah		36	100 %

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2018

Selain tabel diatas, berikut data responden yang diperoleh dari hasil pengembalian kuesioner yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, Tahun Mulai Bekerja, jabatan, Pendidikan dan Latar Belakang Pendidikan.

a. Deskripsi responden berdasarkan usia

Tabel 2 berikut menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 2. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PEREMPUAN	21	58.3	58.3	58.3
	LAKI-LAKI	15	41.7	41.7	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang bekerja pada OPD di Kabupaten Waropen terdapat sebanyak 26 responden atau 58,3 yang berjenis kelamin perempuan, dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang atau 41,7% sehingga responden dalam penelitian ini di dominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin perempuan.

b. Deskripsi responden berdasarkan Masa Kerja sebagai PNS

Tabel 3 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan masa kerja sebagai PNS.

Tabel 3. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja Sebagai PNS

	Tahun	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	1	2.8	2.8	2.8
	18	1	2.8	2.8	5.6
	15	9	25.0	25.0	30.6
	14	1	2.8	2.8	33.3
	13	10	27.8	27.8	61.1
	10	5	13.9	13.9	75.0
	8	9	25.0	25.0	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden (sebanyak 27,8%) atau sebanyak 10 pegawai memiliki masa kerja sebagai PNS dari tahun 13 dan mayoritas kedua yaitu pada masa kerja dari tahun 15 sebanyak 9 pegawai. Sedangkan masa kerja pegawai dari tahun 19 , 18, dan 14 hanya terdiri dari 1 pegawai saja.

c. Deskripsi responden berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan Latar Belakang pendidikan PNS.

Tabel 4. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang

	Jurusan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Akuntansi	1	2.8	2.8	2.8
	Fsipol	12	33.3	33.3	36.1
	Hukum	5	13.9	13.9	50.0
	Lain-lain	5	13.9	13.9	63.9
	Manajemen	9	25.0	25.0	88.9
	Peternakan	1	2.8	2.8	91.7
	Teknik	3	8.3	8.3	100.0

	Jurusan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Akuntansi	1	2.8	2.8	2.8
	Fsipol	12	33.3	33.3	36.1
	Hukum	5	13.9	13.9	50.0
	Lain-lain	5	13.9	13.9	63.9
	Manajemen	9	25.0	25.0	88.9
	Peternakan	1	2.8	2.8	91.7
	Teknik	3	8.3	8.3	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden (sebanyak 33,3%) atau sebanyak 12 pegawai merupakan lulusan dari bidang keilmuan Fsipol, setelah itu sebanyak 9 atau 25% pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan manajemen, namun jika dilihat dari latar belakang pendidikan akuntansi hanya berjumlah 1 pegawai saja atau 2,8%.

d. Deskripsi responden berdasarkan Lulusan Pendidikan

Tabel 5 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan lulusan pendidikan sebagai PNS.

Tabel 5. Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lulusan Pendidikan

	Pendidikan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	2	5.6	5.6	5.6
	D3	2	5.6	5.6	11.1
	S1	26	72.2	72.2	83.3
	S2	6	16.7	16.7	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden (sebanyak 72,2%) atau sebanyak 26 pegawai merupakan lulusan pendidikan Sarjana (S1) dan lulusan pendidikan Pascasarjana berjumlah 6 pegawai dengan 16,7 %.

Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi masing-masing variabel yang digunakan. Pengolahan data ini menggunakan program SPSS versi 16.00. Berikut adalah hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TINV	36	12.00	15.00	13.2778	1.27864
TIDN	36	12.00	15.00	13.0556	.98400
TLA	36	2.00	10.00	8.8889	1.44969
TPEN	36	3.00	15.00	13.4167	2.08909
TOA	36	4.00	20.00	17.3056	2.67068
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Tabel 6 diatas menjelaskan bahwa pada variabel inventarisasi (INV) memiliki jawaban minimum responden sebesar 12.00 dan maksimum sebesar 15.00, dengan rata-rata total jawaban 13,2778 dan standar deviasi sebesar 1,27864. Variabel Legal Audit (LA) juga memiliki jawaban minimum responden sebesar 2.00 dan maksimum sebesar 10.00, dengan rata-rata 8,8889 dan standar deviasi sebesar 1,44969. Variabel Legal Audit (IDN) minimum jawaban responden adalah sebesar 12.00 dan maksimum sebesar 15.00, dengan rata-rata total jawaban 13.0556 dan standar deviasi sebesar 0.98400. Variabel Penilaian (PEN), jawaban minimum responden sebanyak 3.00 dan maksimum sebanyak 15.00, dengan rata-rata total jawaban 13.4167 dan standar deviasi sebesar 2.08909. Sedangkan variabel Optimalisasi Aset (OA), jawaban minimum responden sebanyak 4.00 dan maksimum sebanyak 20.00, dengan rata-rata total jawaban 17.3067 dan standar deviasi sebesar 2.6708.

Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Inventarisasi (INV), Legal Audit (LA), Identifikasi (IND), Penilaian Aset dan Optimalisasi Aset (OP) dengan 36 sampel responden.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Inventarisasi Aset

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-Tailed)</i>	Keterangan
(INV1)	0,826	0,000	Valid
(INV2)	0,844	0,000	Valid
(INV3)	0,909	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Tabel 7 menunjukkan variable Inventarisasi (INV) mempunyai kriteria yang valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Legal Audit

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-Tailed)</i>	Keterangan
(SLA1)	0,938	0,000	Valid
(SLA2)	0,939	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Legal Audit (LA) mempunyai kriteria yang valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Identifikasi

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-Tailed)</i>	Keterangan
(IND1)	0,604	0,000	Valid
(IND2)	0,732	0,000	Valid
(IND3)	0,744	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Identifikasi mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Penilaian Aset

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-Tailed)</i>	Keterangan
(PEN1)	0,920	0,000	Valid
(PEN2)	0,897	0,000	Valid
(PEN3)	0,905	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Penilaian Aset (PEN) mempunyai kriteria yang valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Optimalisasi Aset

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-Tailed)</i>	Keterangan
(OA1)	0,871	0,000	Valid
(OA2)	0,909	0,000	Valid
(OA3)	0,882	0,000	Valid
(OA4)	0,882	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel Optimalisasi Aset (OA) mempunyai kriteria yang valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* berada diatas 0,6. Hasil Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's Alpha* dari variabel Inventarisasi adalah sebesar 0,823, Identifikasi sebesar 0,893, Legal Audit sebesar 0,864, variabel penilaian sebesar 0,893 dan Optimalisasi Aset sebesar 0,909. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan

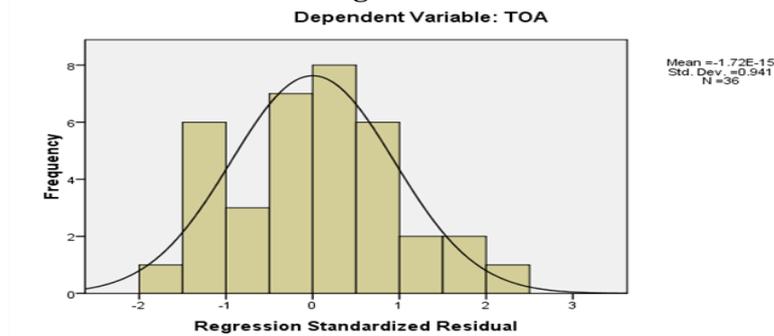
bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti, apabila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

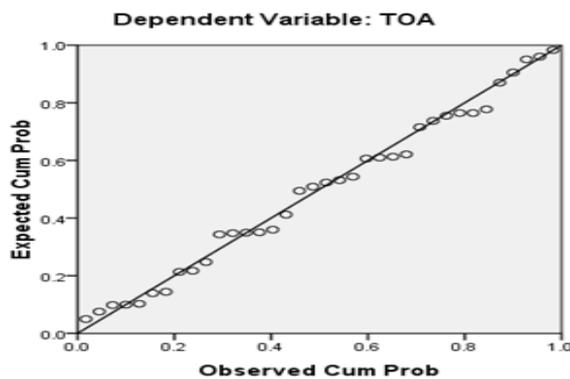
Uji Normalitas

Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan analisis grafik dengan melihat histogram dan *normal probability plot*. Apabila *ploting* data membentuk satu garis lurus diagonal maka distribusi data adalah normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan diagram.

Gambar 2
Histogram



Gambar 3
P-P Plot



Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Pada tampilan grafik histogram terlihat bahwa grafik memberikan pola distribusi normal. Sedangkan pada grafik normal P-Plot menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik telah mendekati sumbu diagonalnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali,2006).

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Inventarisasi	0,944	1,060	Tidak terjadi multikolonieritas
Identifikasi	0,954	1,049	Tidak terjadi multikolonieritas
Legal Audit	0,503	1,987	Tidak terjadi multikolonieritas
Penilaian Audit	0,511	1,958	Tidak terjadi multikolonieritas

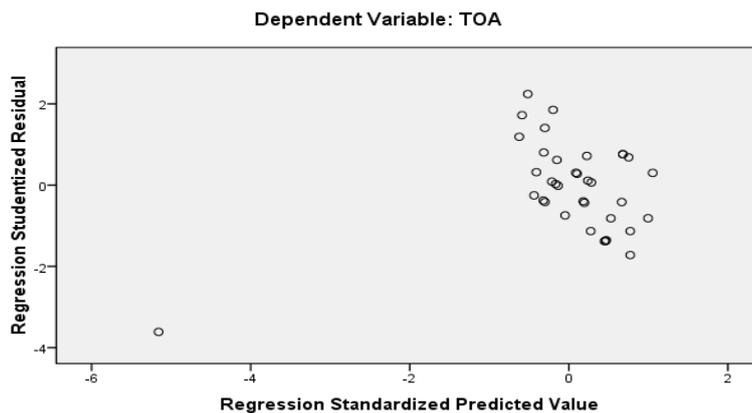
Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Berdasarkan Tabel 12 yang merupakan hasil multikolinearitas, dapat dilihat besaran nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independennya yang didapatkan yaitu 0,967 yang berarti lebih besar dari 0,1 dan VIF (*variance inflation factor*) masing – masing variabel sebesar 1.060 , 1.049, 1.987 dan 1.958 atau lebih kecil dari 10, maka dari hasil nilai *tolerance* dan VIF, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas didalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola nilai tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Gambar 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Berdasarkan Gambar 4 yang merupakan hasil uji heteroskedastisitas, dapat dilihat titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak terjadi pengumpulan atau membentuk suatu pola tertentu melainkan hasil yang terjadi adalah terlihat pola titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Tabel 13 menyajikan hasil uji koefisien determinasi R^2 untuk variabel Inventarisasi, Identifikasi, Legal Audit, Penilaian dan Optimalisasi Aset.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.781 ^a	.611	.560	1.77069
---	-------------------	------	------	---------

a. Predictors: (Constant), TPEN, TINV, TIDN, TLA

b. Dependent Variable: TOA

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan diatas menunjukkan tingkat pengaruh keempat variabel independen yaitu Inventarisasi, Identifikasi, Legal Audit dan Penilaian Terhadap Kualitas Optimalisasi Manajemen Aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen adalah sebesar 56,0% dan sisanya 44,00 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar kedua variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara individual atau parsial terhadap variabel dependen, dimana dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari Inventarisasi, Legal, Identifikasi Audit dan Penilaian, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah Optimalisasi Manajemen Aset.

Tabel 14. Hasil Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.013	5.237		1.530	.136
TINV	.061	.241	.029	.252	.803
TLA	-.601	.291	.326	2.067	.047
TIDN	-.407	.311	-.150	-1.307	.201
TPEN	.630	.200	.493	3.144	.004

a. Dependent Variable: TOA

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Model Regresi

Pengujian model regresi hasil olah statistik adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,013 + 061 T INV - ,601 TLA -,407 T IND + 630 TPEN$$

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa variabel inventarisasi, legal audit dan penilaian mempunyai arah yang positif terhadap optimalisasi aset. Hal ini berbeda dengan variabel identifikasi yang berpengaruh negatif terhadap optimalisasi aset. Praktek yang ada di kabupaten waropen, bahwa identifikasi memang belum berjalan baik, sehingga tidak memberikan arah yang positif. Banyak aset yang belum teridentifikasi dengan baik sehingga upaya optimalisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

Inventarisasi Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Waropen

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.14 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel Inventarisasi (INV) terhadap Optimalisasi Aset (Y) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu

sebesar $0,252 < 1.661$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari $0,05$, yaitu $0,803 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Inventarisasi (INV) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Aset. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini **ditolak**.

Berdasarkan hasil diatas bahwa inventarisasi tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Aset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi belum dilaksanakan dengan baik, padahal inventarisasi barang milik daerah sudah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016. Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terhambatnya inventarisasi barang yaitu kurangnya pegawai atau petugas yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi, menurut responden penelitian bahwa pegawai yang berlatarbelakang akuntansi berjumlah 1 orang saja, sedangkan yang lain adalah berlatar belakang pendidikan stipol dan manajemen. Seharusnya petugas yang bertanggung jawab melakukan inventarisasi haruslah petugas yang kompeten dan memiliki pengetahuan tentang manajemen aset. Karena tahapan inventarisasi ini merupakan salah satu tahapan paling krusial dan memerlukan ketelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak permasalahan mengenai inventarisasi aset terutama di Pemerintahan yang menjadi faktor pengganjal opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Secara umum ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses inventarisasi. Ada beberapa faktor yang penyebab terhambatnya proses inventarisasi aset yaitu, Banyaknya variasi aset, Banyaknya jumlah dalam variasi aset, Serta petugas inventarisasi yang merangkap tugas lain.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Montayop (2012) yang menjelaskan bahwa inventarisasi aset haruslah dilakukan secara periodik karena aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Inventarisasi perlu dilaksanakan agar pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Boven Digoel dapat mengetahui secara pasti mengenai jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan seperti yang diungkapkan Mardiasmo, (2004).

Legal Audit Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Waropen

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.14 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel Legal Audit (LA) terhadap Optimalisasi Aset (Y) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar $2.067 > 1.661$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari $0,05$, yaitu $0,047 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Legal Audit (LA) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Aset. Dengan demikian hipotesis pertama (H_2) pada penelitian ini **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naution (2013). Legal audit membawa pemda untuk lebih waspada dan lebih peka untuk melengkapi dokumen dan bukti kepemilikan dari aset-aset pemda. Pemda tentunya menginginkan agar aset-aset yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pemda berada pada titik aman dan tidak memberikan peluang bagi pihak lain yang ingin menguasai aset tersebut dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Pemda tentunya menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik atas keabsahan dokumen-dokumen kepemilikan aset, dan diharapkan setiap tahunnya jumlah aset dengan dokumen kepemilikan lengkap semakin bertambah dan masalah mengenai pertikaian aset karena dokumen kepemilikan dengan pihak lain semakin kecil.

Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain – lain. Sehingga perlu dilakukan sensus terhadap asset-aset pemerintah adanya sensus tersebut diharapkan dapat mengetahui aset – aset apa saja yang merupakan milik Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah kota juga tengah berupaya untuk membuat sertifikat sebagai tanda kepemilikan yang sah terhadap aset dalam hal ini tanah, karena salah satu permasalahan khususnya di Papua adalah terkait dengan budaya yang masih sangat kental. Masih terdapat banyak tanah yang diakui sebagai tanah adat, namun adakalanya pemerintah tetap berusaha melakukan pelepasan tanah adat tersebut secara

bertahap, sehingga seluruh aset milik Pemerintah menjadi jelas. Namun penelitian ini berbeda dengan Hasil penelitian ini dengan hasil penelitian oleh Hayati (2012), dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penilaian aset terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen aset.

Identifikasi Tidak Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Waropen

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.14 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel Identifikasi (IDN) terhadap Optimalisasi Aset (Y) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar $-1.307 < 1.661$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu $0,201 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa variabel Identifikasi (IDN) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Aset. Dengan demikian hipotesis pertama (H_3) pada penelitian ini **ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2016) bahwa identifikasi tidak berpengaruh terhadap optimalisasi asset. Hasil tersebut juga menandakan bahwa identifikasi belum meningkatkan optimalisasi pemanfaatan asset pada Kabuapaten Waropen, hal ini disebabkan oleh perbedaan kode barang pada barang yang bersangkutan dengan yang tertera di Daftar Barang Ruangan, Jumlah barang yang ada tidak sesuai dengan yang tertera di Daftar Barang Ruangan. Sulitnya proses penghapusan barang sehingga barang yang kondisinya rusak sudah dipindahkan dari ruangan, padahal masih tertera di Daftar Barang Ruangan sehingga proses identifikasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Penilaian Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Waropen

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.14 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel Penilaian (PEN) terhadap Optimalisasi Aset (Y) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar $3,144 > 1.661$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu $0,0804 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa variabel Inventarisasi (PEN) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Aset. Dengan demikian hipotesis pertama (H_4) pada penelitian ini **diterima**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penilaian Hayati (2012) yang menyatakan bahwa Penilaian aset adalah proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Proses kerja ini biasanya dilakukan oleh konsultan penilai yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk menentukan harga bagi aset yang ingin dijual. Dapat dilihat bahwa proses penilaian aset yang dilakukan oleh Pemerintah masih belum maksimal, karena masih menggunakan jasa pihak ketiga, bukan lembaga independen (bersertifikat). Padahal penilaian aset sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam optimalisasi aset, karena penilaian aset bertujuan untuk mengetahui nilai kekayaan yang terkandung yang dapat

Menurut penelitian Sherly dkk (2012) Saat ini di pemda banyak terdapat asset-aset yang tidak memiliki nilai sehingga dalam proses penggunaan dan pemanfaatannya tidak berjalan optimal, sehingga sangat diperlukan penilaian atas aset yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kompetensi di bidang penilaian, sehingga aset-aset yang tadinya tidak memiliki nilai dapat menjadi memiliki nilai dan dapat segera digunakan ataudimanfaatkan.

Salah satu tujuan dilakukannya penilaian adalah untuk pemanfaatan aset. Dalam hal ini aset yang dimanfaatkan (disewakan) kepada pihak ketiga terlebih dahulu harus memiliki nilai yang jelas dan wajar, sehingga dalam proses penyewaannya nilai yang akan didapatkan dapat sesuai dengan kegunaan yang diberikan oleh aset tersebut. Aset yang dimanfaatkan melalui penyewaan maupun kerjasama dengan pihak lain akan mendatangkan pendapatan bagi daerah. Dukungan dari penilai independen berupa kompetensi mereka yang digunakan pada saat melakukan penilaian atas aset untuk hasil penilaian diharapkan memberikan hasil yang akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan

dengan teori *Good Governanace* dari UNDP, dimana prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar tercipta *Good Governance* adalah harus transparan dan akuntabel.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Waropen dapat disimpulkan bahwa Inventarisasi aset, Legal Audit, Identifikasi aset dan Penilaian Aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Kabupaten Waropen.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 56,00% sedangkan 44,% dijelaskan oleh faktor lain diluar dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan hanya dalam cakupan wilayah yang sempit yaitu Objek Pemerintah Daerah yaitu di Kabupaen Waropen dan Tingkat Pengembalian Kuesioner yang masih kecil disebabkan karena Responden belum memahami Optimalisasi pemanfaatn Aset.

Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan selaku pengelola BMD dapat rutin melakukan inventarisasi atau sensus BMD dalam lima (5) tahun sekali, sehingga data mengenai BMD (baik dalam penggunaan maupun pemanfaatannya) dapat lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan dan lebih serius dalam menyikapi bukti dan status kepemilikan aset daerah guna menghindari penyerobotan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Bagi Akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peneliti selanjutnya untuk menguji variabel lain yang bisa mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset, mulai dari sistem informasi dan pengawasan serta pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alliasuddin. (2002). Produksi Optimal dan RTS: Industri Besar dan Sedang di Provinsi NAD. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 2002, (pp. 1-7).
- Antoh, A. E. (2012). *Manajemen Aset Dalam Rangka Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=56194
- Azhari, L., & Roos, A. (2010). Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset. *Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, Volume 17, Nomor 3, Desember 2010.
- Boediono. (1999). *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Yuli Lilik. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Aset Tanah Dan Bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat*. Universitas Indonesia. <http://lontar.ui.ac.id/abstrak>
- Hayati, M., Ramayani, C., & Areva, D. (2012). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Barat. *Artikel* (p. 10). Sumatera Barat: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)
- Jusmin. (2013). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=60674
- Nasution, E. (2013). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatra Daerah. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43647/erlini%20harmein%20yeni.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara*. Jakarta: sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara*. Jakarta: sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Jakarta.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset Strategi Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syahroza, A. (2013). *Corporate Governance sejarah dan perkembangan, teori model, dan sistim Governance serta aplikasinya pada perusahaan BUMN*. Tesis. Jakarta: Universita Indonesia.
- Widayanti, E. (2010). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/12363/MjY5MjU=/Pengaruh-manajemen-aset-t>

